

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pesisir Pantai dan Hutan Mangrove**

#### **1. Pesisir Pantai**

Wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, lamun, pantai berpasir dan lainnya yang satu sama lain saling terkait. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia baik langsung atau tidak langsung maupun proses-proses alamiah yang terdapat diatas lahan maupun lautan (Djau, 2012).

Scura *et al.* (1992) dalam Cicin-Sain and Knecht (1998), mengemukakan bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, yang didalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki habitat dan ekosistem (seperti estuari, terumbu karang, padang lamun) yang dapat menyediakan suatu (seperti ikan, minyak bumi, mineral) dan jasa (seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, rekreasi) untuk masyarakat pesisir.

- b. Dicitrkan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya dan ruang oleh berbagai *stakeholders*, sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumberdaya.
- c. Menyediakan sumberdaya ekonomi nasional dari wilayah pesisir dimana dapat menghasilkan GNP (*Gross National Product*) dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir dan lain-lain.
- d. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi.

Wilayah pesisir dan lautan, ditinjau dari berbagai macam peruntukannya, merupakan wilayah yang sangat produktif. Produktivitas primer di wilayah pesisir, seperti pada ekosistem estuari, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, ada yang mencapai lebih dari 10.000 gr C/m<sup>2</sup>/th, yaitu sekitar 100-200 kali lebih besar di bandingkan dengan produktivitas primer yang ada di perairan laut bebas (lepas pantai). Tingginya produktivitas primer pada ekosistem di wilayah pesisir memungkinkan tingginya produktivitas sekunder (ikan dan hewan-hewan laut lainnya) (Supriharyono, 2000).

Ekosistem di wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Ekosistem di wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan

terhadap ekosistem pesisir (Dahuri *et al.*, 2001). Konsentrasi pembangunan kehidupan manusia dan berbagai pembangunan di wilayah tersebut disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat, yaitu bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang produktif di bumi, wilayah pesisir menyediakan kemudahan bagi berbagai kegiatan serta wilayah pesisir memiliki pesona yang menarik bagi obyek pariwisata. Hal-hal tersebut menyebabkan kawasan pesisir di dunia termasuk Indonesia mengalami tekanan ekologis yang parah dan kompleks sehingga menjadi rusak (Dahuri, 1998 *dalam* Djau, 2012).

Setiap organisme pendukung di sub sistem ekosistem pesisir mempunyai daya tahan terhadap perubahan lingkungan yang spesifik. Organisme yang tahan bahan pencemar akan tetap *survive*, sedangkan yang tidak tahan akan punah. Akibat perubahan atau penurunan kualitas lingkungan fisik-kimia air, seperti salinitas, suhu air, level penetrasi cahaya nutrien, di wilayah pesisir akan menurunkan produktivitas ekosistem pesisir tersebut (Macnae, 1968; Zieman, 1975; Kanwisher dan Wainwright, 1967; *dalam* Supriharyono, 2000).

## **2. Hutan Mangrove**

Hutan mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Irwanto, 2008). Secara umum

hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai (Alamendah, 2011).

Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis, namun labil. Dikatakan kompleks karena ekosistemnya selain dipenuhi oleh vegetasi mangrove, juga merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Bersifat dinamis karena hutan mangrove dapat tumbuh dan berkembang terus serta mengalami suksesi sesuai dengan perubahan tempat tumbuh alaminya. Dikatakan labil karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih seperti sediakala. Ciri-ciri hutan mangrove antara lain:

- a. Memiliki jenis pohon yang relatif sedikit.
- b. Memiliki akar tidak beraturan (*pneumatofora*) misalnya seperti jangkar melengkung dan menjulang pada bakau *Rhizophora spp.*, serta akar yang mencuat vertikal seperti pensil pada pidada *Sonneratia spp.*, dan pada api-api *Avicennia spp.*
- c. Memiliki biji (propagul) yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di pohonnya, khususnya pada *Rhizophora spp.*
- d. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon.

Menurut Bengen (2001) flora mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi di hutan mangrove mencerminkan tanggapan ekofisiologis tumbuhan mangrove terhadap gradasi lingkungan. Zonasi yang terbentuk bisa berupa zonasi yang sederhana

dan zonasi yang kompleks tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Beberapa faktor lingkungan yang penting dalam mengontrol zonasi adalah:

- a. Pasang surut yang secara tidak langsung mengontrol dalamnya muka air (*water table*) dan salinitas air dan tanah. Secara langsung arus pasang surut dapat menyebabkan kerusakan terhadap anakan.
- b. Tipe tanah yang secara tidak langsung menentukan tingkat aerasi tanah, tingginya muka air dan drainase.
- c. Kadar garam tanah dan air yang berkaitan dengan toleransi spesies terhadap kadar garam serta pasokan dan aliran air tawar.
- d. Cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan dari spesies intoleran seperti *Rhizophora*, *Avicennia* dan *Sonneratia*.
- e. Pasokan dan aliran air tawar.

Menurut struktur ekosistem, dikenal tiga tipe formasi mangrove, yaitu:

- a. Mangrove pantai: pengaruh air laut lebih dominan daripada air sungai. Struktur horizontal formasi ini dari arah laut ke arah darat adalah mulai dari tumbuhan pionir (*Avicennia sp.*), diikuti oleh komunitas campuran *Sonneratia alba*, *Rhizophora apiculata*, selanjutnya komunitas murni *Rhizophora sp.* dan akhirnya komunitas campuran *Rhizophora-Bruguiera*. Bila genangan berlanjut, akan ditemui komunitas murni *Nypa fruticans* di belakang komunitas campuran yang terakhir.

- b. Mangrove muara: pengaruh oleh air laut sama dengan pengaruh air sungai. Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis *Rhizophora spp.* Di tepian alur, diikuti komunitas campuran *Rhizophora-Bruguiera* dan diakhiri komunitas murni *Nipah fruticans*.
- c. Mangrove sungai: pengaruh oleh air sungai lebih dominan daripada air laut, dan berkembang pada tepian sungai yang relatif jauh dari muara. Jenis-jenis mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas daratan (Purnobasuki, 2005).

Menurut Bengen (2001), jenis-jenis pohon penyusun hutan mangrove, umumnya mangrove di Indonesia jika dirunut dari arah laut ke arah daratan biasanya dapat dibedakan menjadi 4 zonasi yaitu sebagai berikut:

a. Zona Api-api – Pidada (*Avicennia–Sonneratia*)

Zona api-api terletak paling jauh atau terdekat dengan laut, keadaan tanah berlumpur agak lembek (dangkal), dengan substrat agak berpasir, sedikit bahan organik dan kadar garam agak tinggi. Zona ini biasanya didominasi oleh jenis api-api dan pidada dan biasanya berasosiasi dengan jenis bakau.

b. Zona Bakau (*Rhizophora*)

Zona bakau biasanya terletak di belakang api-api dan pidada, keadaan tanah berlumpur lembek (dalam). Pada umumnya didominasi bakau dan di beberapa tempat dijumpai berasosiasi dengan jenis lain seperti tanjang.

c. Zona Tanjang (*Bruguiera*)

Zona tanjang terletak di belakang zona bakau, agak jauh dari laut dekat dengan daratan. Keadaan berlumpur agak keras, agak jauh dari garis pantai.

Pada umumnya ditumbuhi jenis tanjang dan di beberapa tempat berasosiasi dengan jenis lain.

d. Zona Nipah (*Nipah fruticans*)

Zona nipah terletak paling jauh dari laut atau paling dekat ke arah darat. Zona ini mengandung air laut dengan salinitas sangat rendah dibandingkan zona lainnya, tanahnya keras, kurang dipengaruhi pasang surut dan kebanyakan berada di tepi sungai dekat laut. Zona ini pada umumnya ditumbuhi jenis nipah dan beberapa spesies palem lainnya.

Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologis sebagai berikut:

- a. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang.
- b. Lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri.
- c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air atau air tanah) yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur.
- d. Suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5°C dan suhu rata-rata di bulan terdingin lebih dari 20°C.

- e. Airnya payau dengan salinitas 2-22 ppt (*parts per thousand*) dan asin dengan salinitas 38 ppt.
- f. Topografi pantai yang datar atau landai, arus laut tidak terlalu deras dan terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat.

## **B. Ekowisata**

Menurut Hector Ceballos- Lascurain (1987) Ekowisata adalah perjalanan ke tempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, flora dan fauna, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini. Bagi kebanyakan orang, terutama para pencinta lingkungan, rumusan yang dikemukakan oleh *Hector Ceballos dan Lascurain* tersebut belumlah cukup untuk menggambarkan dan menerangkan kegiatan ekowisata.

Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh *Hector Ceballos dan Lascurain* (1987) dan kemudian disempurnakan oleh *The Ecotourism Society* (1993) dengan mendefinisikan ekowisata sebagai suatu perjalanan bertanggungjawab ke lingkungan alami yang mendukung konservasi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata sesungguhnya adalah suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber

daya alam dan budaya masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan (Putra Alam, 2012).

Menurut *World Conservation Union* (WCU), ekowisata merupakan perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal. Sementara itu Wood (2002) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut Indrawan dkk (2007). Ekowisata merupakan suatu kategori rekreasi yang melibatkan sejumlah orang yang mengunjungi suatu tempat dan membelanjakan seluruh atau sebagian uangnya demi memperoleh pengalaman berinteraksi dengan komunitas biologi yang luar biasa. Ekowisata didefinisikan sebagai bentuk wisata yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian alam, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Jika dikaji, maka definisi ini menekankan pada pentingnya gerakan konservasi. Seiring dengan berkembangnya niat konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka lahir definisi baru mengenai Ekowisata, yaitu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonversi lingkungan dengan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Definisi terbaru dari ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan menyetarakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan

kelestarian ekologis. Jika berdasar pada definisi yang terakhir ini, maka dapat dirumuskan bahwa Ekowisata pesisir dan laut adalah wisata yang berbasis pada sumberdaya alam pesisir dan laut dengan menyertakan aspek pendidikan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekosistem pesisir dan laut (Tuwo, 2011).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wilayah pesisir terdiri atas sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut dan sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Dahuri dkk. (2008) mengemukakan bahwa di dalam kawasan pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan atau ekosistem dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di kawasan pesisir antara lain adalah terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai berpasir, estuaria, laguna, dan delta. Ekosistem buatan antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman.

Disamping sumberdaya alam yang produktif ekosistem pesisir dan laut merupakan penyedia jasa pendukung kehidupan, seperti air bersih dan ruang yang diperlukan bagi berkiprahnya segenap kegiatan manusia. Sebagai penyedia jasa- jasa kenyamanan ekosistem pesisir dan laut merupakan lokasi indah dan menyejukkan untuk dijadikan tempat rekreasi atau parawisata (Bengen, 2004).

Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan kebijakan penting Depatemen Kalutan dan Perikanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah peisisir dan laut secara ekologis dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, namun pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumberdaya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung. Pengembangan ekowisata merupakan salah satu alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut (Tuwo, 2011).

Berikut dikemukakan juga prinsip pengembangan ekowisata dan kriteria ekowisata yang disusun oleh kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan *Indonesian Ecotourism Network* (INDECON), yang secara konseptual menekankan tiga konsep dasar, yaitu:

1. Prinsip Konservasi : pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam.

2. Prinsip Partisipasi Masyarakat : pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat sekitar kawasan.
3. Prinsip Ekonomi : pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang. bangunan yang seimbang (*balanced development*) antara kebutuhan pelestarian lingkungan & kepentingan semua pihak.
4. Prinsip Edukasi : pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Prinsip Wisata : pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan pengalaman yang original kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.

Ekowisata memberikan sarana untuk meningkatkan kesadaran orang akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan lingkungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Ekowisata harus menjamin agar wisatawan dapat menyumbang dana bagi pemeliharaan, keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah yang dilindungi sebagai salah satu proses pendidikan memelihara lingkungan (Sastrayuda, 2010).

## 1. Pendekatan Zonasi Kawasan Ekowisata

Untuk melindungi suatu kawasan wisata dari pengunjung wisata maka perlu dilakukan zonasi. Hal ini untuk melindungi sumberdaya maupun memberikan keragaman pengalaman bagi pengunjung. Zonasi merupakan pembagian kawasan berdasarkan potensi dan karakteristik sumberdaya alam untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan guna memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan.

Zonasi merupakan alat yang paling umum bagi pengelolaan kawasan yang dilindungi untuk memisahkan kawasan yang pemanfaatannya bertentangan, serta untuk pengelolaan kawasan dengan manfaat ganda (Purnama, 2005). Bengen (2002) menyatakan bahwa penetapan zonasi kawasan adalah pengelompokan areal suatu kawasan ke dalam zona-zona sesuai dengan kondisi fisik dan fungsinya. Zonasi bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi ekologi dan ekonomi ekosistem suatu kawasan sehingga dapat dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan.

Menurut Helmi (2010) zona merupakan suatu kawasan yang mempunyai kemampuan dan karakteristik yang sama untuk suatu peruntukan yang sesuai di daratan dan laut. Zonasi bertujuan untuk membagi wilayah darat dan laut dalam kawasan yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (*incompatible*).

Prinsip penetapan zonasi adalah : 1) Sumberdaya alam maupun budaya memiliki karakteristik dan toleransi tertentu untuk dapat diintervensi, dan 2) Pengelola harus dapat melakukan sesuatu untuk memelihara dan mempertahankan karakteristik dan kemampuan tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan dari penggunaan sekarang maupun yang akan datang (Basuni 1987 dalam Purnama, 2005).

Kawasan ekowisata sebagian besar memanfaatkan potensi sumberdaya alam sebagai daya tarik wisata. Sistem zonasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi sumberdaya alam dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan. Menurut Yulianda (2007), pada zonasi ekowisata, peletakan fasilitas dibedakan dalam tiga zonasi yaitu yaitu zona inti, zona penyangga, zona pelayanan dan zona pengembangan.

- a. Zona Inti : dimana atraksi/daya tarik wisata utama ekowisata.
- b. Zona Antara (*Buffer Zone*) : dimana kekuatan daya tarik ekowisata dipertahankan sebagai ciri-ciri dan karakteristik ekowisata yaitu mendasarkan lingkungan sebagai yang harus dihindari dari pembangunan dan pengembangan unsur-unsur teknologi lain yang akan merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan tidak sepadan dengan ekowisata.
- c. Zona Pelayanan : wilayah yang dapat dikembangkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan, sepadan dengan kebutuhan ekowisata.
- d. Zona Pengembangan : areal dimana berfungsi sebagai lokasi budidaya dan penelitian pengembangan ekowisata.

## **2. Prinsip Perencanaan Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai**

Prinsip – prinsip perencanaan kawasan pariwisata pada wilayah pesisir dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Mengetahui profil wilayah kawasan pesisir yang menjadi perencanaan seperti kondisi fisik alam.
- b. Sosial budaya dan ekonomi kawasan pesisir yang menjadi kawasan perencanaan seperti kehidupan atau taraf sosial masyarakat yang tinggal pada kawasan pesisir tersebut contohnya peluang usaha.
- c. Aksesibilitas kawasan pesisir yang menjadi kawasan perencanaan yaitu, akses jaringan transportasi yang baik untuk mencapai kawasan pariwisata pesisir tersebut.
- d. Amenitas Wisata merupakan segala sesuatu yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya selama berwisata di kawasan pesisir tersebut. Kondisi terkini dari amenities (fasilitas pelayanan) berupa hotel dan akomodasi serta restoran (rumah makan).
- e. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang disuguhkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang dapat menambah minat para wisatawan untuk datang pada kawasan pesisir yang berbasis ekowisata. Contohnya, atraksi kesenian, surfing (apabila memiliki ombak yang bagus).

Tuwo (2011) menjelaskan beberapa prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi agar dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut :

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat lokal.
- b. Mendidik atau menyadarkan wisatawan dan masyarakat lokal akan pentingnya konservasi.
- c. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan.
- d. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata.
- e. Keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata dari kegiatan ekowisata harus dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir dan laut.
- f. Semua upaya pengembangan, termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas, harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam.
- g. Pembatasan pemenuhan permintaan, karena umumnya daya dukung ekosistem alamiah lebih rendah daripada daya dukung ekosistem buatan.
- h. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan dialokasikan secara proposional dan adil untuk pemerintah pusat dan daerah.

### **3. Manfaat dan Dampak Kawasan Pesisir Berbasis Ekowisata**

- a. Manfaat Kawasan Pesisir sebagai Kawasan Ekowisata.

Nugroho dan dahuri (2012), juga menjelaskan posisi kritikal dalam pengembangan ekowisata sesungguhnya terletak pada tingkat implementasi di

wilayah lokal atau pemda. Di tingkat lokal tersebut, bertemu kepentingan penyediaan jasa ekowisata dan permintaan pengunjung. Bisnis jasa ekowisata mungkin saja menghadapi kendala seperti dihadapi bisnis umumnya. Namun jasa ekowisata perlu lebih serius ditangani agar supaya menghasilkan nilai tambah yang nyata dan positif bagi kegiatan konservasi lingkungan dan budaya setempat.

Selain itu juga suatu kawasan relatif baru yang memiliki potensi sumberdaya alam yang baik juga memerlukan adanya pemasaran yang baik pula. Pemasaran memberikan kebutuhan akan kegiatan manusia melalui proses pertukaran. Faktor-faktor yang merupakan inti pemasaran adalah produk, harga, promosi dan distribusi. Kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan, usaha swasta atau pemerintah, baik dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan internasional harus diupayakan mencapai kepuasan optimal wisatawan. Kebutuhan-kebutuhan wisatawan dapat dipenuhi dan pelaku usaha wisata memperoleh keuntungan yang wajar (Sudirman, 2013).

Aktivitas ekowisata saat ini tengah menjadi tren yang menarik yang dilakukan oleh para wisatawan untuk menikmati bentuk-bentuk wisata yang berbeda dari biasanya. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya (Satria, 2009).

b. Dampak Kawasan Pesisir sebagai Kawasan Ekowisata.

Satria (2009) menjelaskan, walaupun banyak nilai-nilai positif yang ditawarkan dalam konsep ekowisata, namun model ini masih menyisakan persoalan terhadap pelaksanaannya. Beberapa kritikan terhadap konsep ekowisata antara lain:

1) Dampak negatif dari pariwisata terhadap kerusakan lingkungan. Meski konsep *ecotourism* mengedepankan isu konservasi didalamnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap hal tersebut masih saja ditemui di lapangan. Hal ini selain disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar dan turis tentang konsep ekowisata, juga disebabkan karena lemahnya manajemen dan peran pemerintah dalam mendorong upaya konservasi dan tindakan yang tegas dalam mengatur masalah kerusakan lingkungan.

2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Ekowisata. Dalam pengembangan wilayah Ekowisata seringkali melupakan partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder* penting dalam pengembangan wilayah atau kawasan wisata. Masyarakat sekitar seringkali hanya sebagai obyek atau penonton, tanpa mampu terlibat secara aktif dalam setiap proses-proses ekonomi di dalamnya.

3) Pengelolaan yang salah. Persepsi dan pengelolaan yang salah dari konsep ekowisata seringkali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini selain disebabkan karena pemahaman yang rendah dari konsep Ekowisata juga disebabkan karena lemahnya peran dan pengawasan pemerintah untuk mengembangkan wilayah wisata secara baik.

Untuk mengembangkan pengelolaan ekowisata, diperlukan koordinasi antar lembaga dalam penanganan wisata diperlukan untuk menghindari konflik antar pemanfaat wilayah pesisir. Adanya berbagai pihak yang melakukan aktivitas di kawasan pesisir tanpa disertai konservasi dan pemulihan akan berdampak terhadap menurunnya kondisi lingkungan. Konservasi sumber daya alam tetap merupakan isu utama dalam pengelolaan wisata di kawasan pesisir (Amanah dan Utami, 2006). Perkembangan pariwisata juga bergantung pada aspek suprastruktur dan infrastruktur. Aspek suprastruktur merupakan fasilitas penunjang untuk pengunjung seperti penginapan, restoran, kolam renang, dll. Aspek infrastruktur meliputi ketersediaan air bersih, pembuangan sampah dan sumber daya listrik, akses ke *airport*, jalan, pelabuhan, dan lain-lain. Tanpa adanya kedua aspek tersebut, maka pariwisata akan menyebabkan dampak negatif (Amanah dan Utami, 2006).

Setyadi dkk (2012) juga mengungkapkan kendala dalam pengembangan ekowisata diantaranya adalah mengenai jarak, aksesibilitas, peran pelaku pembangunan, pengetahuan tentang konsep ekowisata yang masih terbatas, dan tingkat kunjungan wisatawan yang masih rendah.

### **C. Penataan dan Perencanaan Ruang**

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 pasal 1 tentang penataan ruang disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang laut

sebagai wujud fisik dalam dimensi geografis, penataannya dapat dipandang sebagai suatu rangkaian proses perencanaan pengaturan tata ruang secara efektif dan efisien yang ditetapkan dan dikendalikan dengan fungsi utama untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kewenangannya yang mencakup hingga 12 mil dari garis pantai, umumnya merupakan luasan dari wilayah pesisir. Dengan demikian, pengaturan ruang laut daerah dapat dicakup dalam suatu kesatuan penataan ruang pesisir. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang dimaksudkan untuk membenahi penggunaan lahan yang sedang berjalan dengan tujuan meningkatkan efisiensi sehingga keluaran yang diharapkan adalah yang terbaik dalam dimensi kurun waktu dan ruang tertentu. Dengan demikian secara transparan dalam peta skala tertentu, sesuai menurut kepentingannya dapat dilihat zonasi lahan menurut peruntukannya, antara lain kehutanan, pertambakan, pemukiman, sawah, kawasan industri, perkebunan, kawasan wisata dan kawasan fasilitas umum yang dapat diartikan sebagai penatagunaan sumber alam (Haerumen, 1996).

Secara umum, perencanaan ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, manusia, dan kualitas pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang tersebut dilakukan melalui proses proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikat semua pihak (Darwanto, 2000).

Menurut Departemen Kelautan Perikanan RI (2002) rencana tata ruang berdasarkan hirarki administratif terbagi atas :

1. Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional

merupakan kebijaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ruang pesisir, pulau-pulau kecil dan laut dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan skala peta rencana 1 : 1.000.000.

2. Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Propinsi merupakan arahan penataan dan pemanfaatan ruang, khususnya pengembangan kawasan lindung/konservasi dan pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wilayah propinsi sampai 12 mil, serta sebagai koordinasi perencanaan antar kabupaten, dengan skala peta rencana 1 : 250.000.

3. Rencana Tata Ruang Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kabupaten merupakan rencana penataan dan pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi penetapan lokasi pemintakatan (zonasi) pesisir dan laut dalam wilayah kabupaten atau kota, rencana tata ruang ini merupakan satu kesatuan dengan rencana tata ruang daratan dengan skala peta rencana 1 : 100.000. Pada kabupaten/kota yang relatif kecil dan mempunyai potensi kelautan cukup besar atau mempunyai permasalahan kompleks maka digunakan skala 1 : 50.000.

4. Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kota merupakan rencana penataan dan pemanfaatan ruang sebagai dasar penetapan lokasi pemintakatan (zonasi) pesisir-laut-pulau-pulau kecil dalam wilayah

kabupaten/kota rencana tata ruang ini merupakan kesatuan sinergis dengan rencana tata ruang daratan, dengan skala peta rencana 1 : 50.000.

5. Rencana Tata Ruang Detail Kawasan (RTDK) merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupaten/kota, dimana wilayah perencanaan dapat merupakan satu zona yang dominan, atau lebih dari satu zona yang serasi dan sinergis, dan terbagi atas:
  - a. Rencana detil kawasan yg akan dikelola berdasarkan kebutuhan pengelolaan dengan skala peta rencana 1 : 5.000 sampai 1 : 10.000.
  - b. Rencana teknis/detil Desain, berisi rincian rencana tata letak, dimensi massa bangunan/kegiatan, sarana & prasarana, serta kelayakan investasi dengan skala peta rencana 1: 1.000.
6. Rencana Tata Ruang antar Provinsi dalam Satu Pulau Besar (*Regional Marine Planning*) merupakan suatu koordinasi perencanaan antar provinsi pada setiap pulau besar ditinjau dari permasalahan setiap pulau mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, dengan skala peta rencana 1 : 500.000.
7. Rencana Tata Ruang Lintas Wilayah

Berdasarkan ekobiologis dan keterpaduan harus melintas batas antar Kabupaten/Kota antar Propinsi. Batas wilayah perencanaan juga didasari karakter ekobiologis, dengan skala peta disesuaikan kebutuhan dalam perencanaan.

### **1. Pendekatan Pengelolaan Tata Ruang Kawasan Pesisir Terpadu**

Penyusunan zonasi secara terpadu dilakukan melalui tiga pendekatan (Dahuri dkk, 2001). Pertama penyusunan rencana zonasi mempertimbangkan

kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, kepentingan masyarakat adat dan hak-hak ulayat, serta kepentingan yang bersifat khusus. Kedua, pendekatan bio ekoregions spesifik lokal seperti :

- a. Identifikasi wilayah spesifik yang dimiliki wilayah studi seperti muara yang difungsikan sebagai kawasan utama dan pendukung untuk kegiatan apa saja.
- b. Identifikasi sifat ekologis dan biota spesifik
- c. Identifikasi kegiatan utama perikanan seperti perikanan demersal.

Oleh sebab itu kombinasi penggunaan data biogeofisik yang menggambarkan kondisi bioekoregion merupakan persyaratan yang dibutuhkan (*necessary condition*) dalam menetapkan zona-zona yang akan dipilih. Pendekatan ketiga dilakukan melalui pengumpulan atribut informasi yang dapat digali dari persepsi masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem tersebut, terutama konteks historis mengenai kejadian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masa lampau sampai saat ini.

Prinsip dasar dalam penyusunan tata ruang pesisir terpadu adalah bagaimana mendapatkan manfaat dari sumberdaya yang tersedia seoptimal mungkin dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan (ekologi), disamping memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan pertahanan keamanan (Dahuri *et.al*, 2001).

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan tata ruang mengacu kepada :

- a. Kelestarian Sumberdaya Pesisir

Tujuan utama dari pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk dapat dimanfaatkannya sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya pesisir di dalam memenuhi kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, laju pemanfaatan sumberdaya pesisir harus dilakukan kurang atau sama dengan laju regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi untuk menemukan substitusi non-hayati. Dalam hal ketidakmampuan manusia mengantisipasi dampak lingkungan di pesisir akibat berbagai aktivitas, maka setiap pemanfaatan harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk menjaga keseimbangan ekologi, pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung dan konservasi harus mendapat perhatian khusus, setelah kawasan ini terpenuhi baru ditentukan kawasan budidaya (Dahuri *et.al*, 2001).

#### b. Kesesuaian Lahan

Aktivitas yang akan ditempatkan pada suatu ruang di kawasan pesisir harus memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan (*demand*) dengan kemampuan lingkungan menyediakan sumberdaya (*carrying capacity*). Dengan mengacu kepada keseimbangan antara *demand* dan *supply*, maka akan dicapai suatu optimasi pemanfaatan ruang antara kepentingan masa kini, masa datang serta menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Kesesuaian lahan tidak saja mengacu kepada kriteria biofisik semata, tetapi juga meliputi kesesuaian secara sosial ekonomi (Rayaes, 2006).

#### c. Keterkaitan Kawasan

Interaksi antar beberapa aktivitas pada kawasan pesisir dengan kawasan daratan akan tercipta dan memungkinkan terjadinya perkembangan yang optimal

antar unit-unit kawasan maupun dengan kawasan sekitarnya. Untuk itu penyusunan pemanfaatan kawasan pesisir dibuat sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan antar kawasan dapat saling menunjang dan memiliki keterkaitan dengan kawasan yang berbatasan. Agar dapat menempatkan berbagai kegiatan pembangunan di lokasi sesuai secara ekologis, maka kelayakan biofisik (*biophysical suitability*) di wilayah pesisir harus diidentifikasi lebih dahulu.

Pendugaan kelayakan biofisik ini dilakukan dengan cara mendefinisikan persyaratan biofisik (*biophysical requirements*) setiap kegiatan pembangunan, kemudian dipetakan. Dengan cara ini dapatlah ditentukan kesesuaian penggunaan setiap unit (lokasi) kawasan pesisir (Sulasdi, 2001).

## **2. Zonasi Kawasan Pesisir**

Suatu zona adalah suatu kawasan yang memiliki kesamaan karakteristik fisik, biologi, ekologi, dan ekonomi yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk mengelompokkan kegiatan yang bersifat sinergis dan memilahnyadari kegiatan yang bertentangan; kriteria tersebut merupakan dasar untuk mengidentifikasi zona (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002). Konsep Perencanaan Tata Ruang pesisir tidak dapat mengikuti sepenuhnya konsep daratan karena karakteristik *ekobiologis* dan prinsip dasar yang berbeda. Pada kawasan pesisir pola perencanaan sangat dipengaruhi oleh pembagian zona-zona perlindungan yang sangat ketat hal ini disebabkan karakter wilayah pesisir yang sangat dinamik tapi rentan terhadap perubahan yang terjadi. Untuk keberlanjutan (*sustainable*), secara garis besar wilayah

pesisir dipilah menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002).

- a. Zona konservasi merupakan zona perlindungan yang didalamnya terdapat zona preservasi dan penyangga dapat dimanfaatkan secara terbatas yang didasarkan atas pangaturan yang ketat bagi pemanfaatan ruang.
- b. Zona pemanfaatan (kawasan budidaya) merupakan zona pemanfaatan yang dapat dilakukan secara intensif namun pertimbangan daya dukung lingkungan tetap merupakan syarat utama, pada zona ini terdapat area-area yang merupakan zona perlindungan setempat seperti sempadan sungai dan pantai.
- c. Zona tertentu (pengembangan) merupakan kawasan khusus untuk kegiatan pertahanan dan militer, kawasan cepat berkembang.

Proses penyusunan tata ruang pesisir dan konfigurasi zonasi dapat dilakukan dengan teknik *overlay* (tumpang susun) peta-peta tematik yang memuat karakteristik biofisik wilayah pesisir dari setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan dan peta penggunaan ruang pesisir saat ini (Tahir, 2002).

Perencanaan penggunaan ruang merupakan kegiatan seleksi sebaran ruang untuk tujuan spesifik dengan memadukan informasi kesesuaian lahan, permintaan akan alternatif produk dan penggunaan, kesempatan perluasan dengan ketersediaan ruang dan dalam sistem kelembagaan yang ada (Pirzan, 2000). Perencanaan tata ruang dimulai dari kegiatan evaluasi ruang yang mengidentifikasi karakteristik dan menilainya untuk keperluan tipe wilayah tertentu secara spasial, perencanaan

pemusatan kegiatan tertentu juga pengelompokkan wilayah tertentu untuk tujuan yang ditetapkan (Branch, 1998).